

**PEMANFAATAN SISTEM *E-PLANNING* DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MEDAN**

Oleh:

RAHMADANI

NIM 0501162107

Program Studi
EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020

**PEMANFAATAN SISTEM *E-PLANNING* DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Prodi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

RAHMADANI
NIM. 0501162107



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMADANI**

NIM : 0501162107

Tempat/Tgl Lahir : Silo Bonto, 16 Maret 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Sentosa Lama No. 20, Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 28 September 2020

Yang membuat pernyataan



RAHMADANI
NIM. 0501162107

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PEMANFAATAN SISTEM *E-PLANNING* DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MEDAN

Oleh:

RAHMADANI

NIM. 0501162107

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 28 September 2020

Pembimbing I



Dr. Marliyah, M.Ag.
NIDN. 2026017602

Pembimbing II



Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah, M.Ag.
NIDN. 2026017602

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan” an. Rahmadani, NIM. 0501162107 Prodi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 2 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Prodi Ekonomi Islam.

Medan, 2 November 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,


Dr. Marliyah, M.Ag.
NIDN. 2026017602

Sekretaris,



Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

Anggota

Pembimbing I


Dr. Marliyah, M.Ag.
NIDN. 2026017602

Pembimbing II


Nurbaiti, M.Kom
NIDN. 0108087908

Penguji I


Hendra Harmain, SE.M. Pd
NIP. 2010057302

Penguji II


Rahmi Syahriza, S. Th. I, MA
NIDN. 2003018501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Pemanfaatan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan”** atas nama Rahmadani, Dengan Pembimbing I Ibu Dr. Marliyah, M.Ag. dan Pembimbing II Ibu Nurbaiti, M.Kom.

E-planning adalah sebuah alat sistem informasi perencanaan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun BAPPEDA Kota Medan mengalami beberapa kendala diantaranya keterlambatan proses menginput data sehingga *e-planning* tersebut belum digunakan secara optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sistem *E-Planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Medan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapannya pemanfaatan sistem *e-planning* sudah dilakukan dengan baik namun terdapat beberapa hambatan yaitu, sumber daya manusia yang belum merata pada perencanaan pembangunan daerah, inkonsistensi perencanaan pembangunan karena tekanan politisi dan seringnya perubahan yang terjadi. Adapun cara BAPPEDA Kota Medan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan pelatihan, diberlakukannya *e-planning* dan mengikuti perubahan yang ada dengan cepat dan tepat.

Kata Kunci: *E-planning*, pemanfaatan, pembangunan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas beribu nikmat, berkah ataupun karunia-Nya yang telah diberikan sampai saat ini dan dapat penulis rasakan. Shalawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan safaatnya baik di dunia maupun diakhirat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Sistem *E-Planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan”**. Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terkhusus dan teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar kepada ayahanda Legiman dan Ibunda Marliya yang senantiasa memberikan kasih sayang do'a serta materi yang tek terhinnga sehingga peneulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

. Skripsi ini mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak tertentu. Maka, saya ucapkan terimakasih kepa dapihak-pihak yang sudah membantu, sehingga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.AG. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Imsar, M.Si. Selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Marliyah, M.AG. Selaku Penasehat Akademik Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Marliyah, M.AG. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberi masukan, arahan serta nasehat selama penulis bimbingan
7. Ibu Nurbaiti S.Kom. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberi masukan, arahan serta nasehat selama penulis bimbingan.
8. Bapak dann Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memeberikan banyak ilmunya kepada saya.
9. Bapak Ir. Irwan Ritonga, M.Si, Selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.
10. Ibu Siti Khalijah Selaku Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.
11. Taufik Teguh Pribadi S.Kom. Selaku Staf Sekertariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yang banyak memeberikan arahan kepada penulis.
12. Terkhusus dan teristimewa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Legimen dan ibu Ngatemi Selaku Orang Tua Wali yang membimbing serta memberikan motivasi kepada penulis sampai saat ini.
13. Teristimewa penulis ucapkan kepada Abangda Sopriono, SE. Yang telah begitu banyak memberikan suport, baik secara motivasi maupun materi.
14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan EKI B stambuk 2016 Jurusan Ekonomi Islam.
15. Terima kasih kepada sahabat Batang (Angga Syahfera, Saiful Amri, Febdi Setiadi, Nanda Habibie, Khairil Amin, Rafly Yafiz, Riky Darmawan, Muhammad Rmadhan, Bima Achmad, Marwansyah Utama, Zicri Noor Zailani, Doni Wijaya).

16. Terima kasih keluarga DEMA FEBI UINSU (Rajab Ardiansyah, Mayu Danil, Hasan Basri, Wandu, Fahmi, dan teman-teman
17. seperjuangan lainnya) yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
18. Terima kasih kepada keluarga kos Rumah Sementara (Sandi Agasi, Amris Nasution, Muhammad Amin, Adday Lamy, Imam Nurul Hadi, Adam Sucipto, Ari Haikal, Ramady Pratama, Suriadi, Zordi) yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
19. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahnya dalam pembuatan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas, tiada kata yang paling indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan pula atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun yang diberikan pembaca untuk dapat menambah pemahaman dan wawasan penulis. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan hidayahnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 28 September 2020



Rahmadani
NIM.0501162107

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
A. Kajian Teoritis	7
1. Pemanfaatan Teknologi Informasi	7
2. Perencanaan Pembangunan	9
3. Sistem <i>E-Planning</i>	21
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Penelitian	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Metode Penelitian	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian	32
2. Sumber Data	33
B. Metode Pengumpulan Data	33
C. Metode Pengelolaan Data.....	34
D. Metode Analisis Data.....	35
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah Singkat Intansi.....	38
2. Visi dan Misi BAPPEDA Kota Medan	38
3. Logo dan Struktur Organisasi	40
4. Ruang Lingkup Bidang Kegiatan.....	43
B. Temuan Penelitian	50

1. Pemanfaatan Sistem <i>E-planning</i> dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.....	50
2. Hambatan Dalam Penerapan Sistem <i>E-planning</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan	50
3. Upaya Yang Dilakuan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sistem <i>E-Planning</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.....	51
C. Pembahasan	53
1. Pemanfaatan Sistem <i>E-Planning</i> dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.....	53
2. Hambatan Dalam Penerapan Sistem <i>E-Planning</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan	56
3. Upaya Yang Dilakuan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sistem <i>E-Planning</i> di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.....	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat merupakan peluang bagi pengaksesaan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka hak dan tanggungjawab pemerintah daerah makin tinggi baik itu dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan potensi yang ada. Agar dapat melaksanakan hak dan tanggungjawab tersebut secara efisien dan efektif, maka organisasi pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang strategis dan operasional pemerintah secara efisien dan efektif dengan berlandaskan pada prinsip *good governance*.¹

Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang "tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja daerah".²

Perencanaan pembangunan dalam sistem pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini membutuhkan dukungan sistem informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan, menyimpan dan memproses kebutuhan data. Perpaduan antara sistem informasi manajemen dengan perencanaan pembangunan daerah sudah banyak dimanfaatkan oleh

¹Egis Teknotat Grandis,"Efektifitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar", h. 104.

²Permendagri. No. 28 Tahun 2017, h. 2.

pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan memiliki tujuan memperbaiki hasil informasi yang dihasilkan, selain itu juga akan membuat perencanaan pembangunan menjadi konsisten mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota bagi pemerintah daerah dan sampai dengan tingkat nasional bagi pemerintah pusat.³

Akan tetapi untuk menyusun perencanaan pembangunan permasalahan yang sering dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana, yaitu SKPD kesulitan dalam menyusun dokumen rencana dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum mencapai seperti apa yang diharapkan sebagaimana tertera dalam visi dan misi organisasi dalam dokumen Renstra SKPD.

Kemudian permasalahan lainnya adalah adanya penyesuaian terhadap target rencana setiap tahun dalam renstra yang sering kali menjadi permasalahan tentang apa perlu tidaknya mengadakan perubahan atau penyesuaian. Hal ini tentunya menyulitkan dalam menyusun anggaran prioritas dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, untuk melakukan hal ini membutuhkan sinkronisasi, verifikasi, validasi serta integrasi data beserta alternatif rumusan-rumusan *action plan* menuju percepatan serta ketepatan pencapaian tujuan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Maka dengan itu pemerintah melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan inovasi teknologi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) atau biasa juga disebut *e-Planning*. *E-Planning* adalah aplikasi yang menginovasi proses Musrenbang Kecamatan, Kabupaten/Kota, Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD hingga KUA-PPAS menjadi lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan

³Balgi Fahmi Sani, Harianto, "Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning" Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol 9 No 1, Juni 2017, h. 58.

yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi tools dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, aturan ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

E-planning yang berisi tentang menu- menu RPJMD selama 5 tahunan bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang dimanifestasikan kedalam Renstra dan Renja SKPD yang disertai dengan laporan-laporan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah.⁴ Kota Medan merukan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem *e-planning* sebagai salah satu inovasi pemerintahan yang penerapannya dimulai pada tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah Kota Medan.

Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan

No.	Wilayah	Jumlah
1	Kecamatan	21
2	Kelurahan	151
3	Lingkungan	2001

Sumber Data: BAPPEDA Kota Medan

Berbagai program kegiatan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat lingkungan hingga tingkat kecamatan dapat di pantau oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan. Aplikasi *e-planning* atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah memfasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

⁴Egis Teknotat Grandis, "Efektifitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar", h. 104.

rencana pembangunan daerah. Sampai saat ini jumlah pegawai Bappeda Kota Medan sebanyak 63 Orang dengan rincian:

Jumlah pengguna sistem *E-Planning* di BAPPEDA Kota Medan

NO.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	22 orang
2	Bidang Data	10 orang
3	Bidang Ekonomi	10 orang
4	Bidang Sosbud	11 orang
5	Bidang Fisik	10 orang
	Jumlah	63 orang

Sumber: BAPPEDA Kota Medan

Dalam pengaplikasian sistem *e-planning* sudah berjalan selama tiga tahun ini memang sudah dapat membantu kinerja namun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi yang dapat memperlambat proses sistem diantaranya keterlambatan menginput data sehingga *e-planning* tersebut belum digunakan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi atau penelitian awal peneliti ada menemukan beberapa masalah dalam penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia yang belum merata pada perencanaan pembangunan daerah.
- b. Inkonsistensi perencanaan pembangunan karena tekanan politisi.
- c. Seringnya perubahan yang terjadi.⁵

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Sistem *e-planning* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan”.

⁵Taufik Teguh Pribadi Staf Sekretariat BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan tanggal 21 Februari 2020.

Dengan kemajuan teknologi ini maka suatu perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang diharapkan dapat menjadi efektif, efisien serta berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Berbagai kegiatan perekonomian dapat berjalan lebih baik serta mampu menambah tingkat pendapatan masyarakat dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, adapun masalah yang ingin di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan Sistem *e-planning* dalam Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui antara lain:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan Sistem *e-planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat untuk :

1. Peneliti

Sebagai studi perbandingan antara pengetahuan teoritis yang di peroleh diperkualiahkan dengan prakteknya di dunia pembangunan daerah khususnya tentang suatu pemanfaatan sistem *e-planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.

2. Akademisi

Sebagai bahan motivasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

3. Praktisi

Dapat memberikan bahan informasi dan referensi kepada fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mahasiswa dan para pembaca dapat membantu pihak yang berkepentingan. Menambah pengetahuan dan memperkaya pustaka ilmu-ilmu sosial terutama mengenai suatu perencanaan pembangunan. Menambah wawasan tentang apa saja manfaat dari penerapan sistem *e-planning* dalam perencanaan pembangunan.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Medan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teoritis

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah, yang memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik digunakan secara langsung maupun tidak digunakan langsung agar dapat bermanfaat.

Sedangkan menurut prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa “Pemanfaatan adalah, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”.¹

Jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah menggunakan sistem aplikasi *e-planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.

b. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengguna teknologi sebagai media pengelola informasi. Berikut ini pengertian teknologi informasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:

1) Haag dan Keen

Menurut Haag dan Keen teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

¹Defenisi dan Pengertian Umum Menurut Para Ahli (www.defenisi-pengertian.com/2015/07).

2) Martin

Menurut Martin teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau memperluas informasi.²

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengelola data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat serta berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sudah mempengaruhi berbagai macam bidang kehidupan dan profesi, hal ini menyebabkan perubahan sistem pada instansi atau perusahaan juga ikut merubah cara kerja mereka. Teknologi informasi banyak digunakan untuk pengelolaan pekerjaan karena daya efektivitas dan efisiensinya yang sudah terbukti mampu mempercepat kinerja, kecepatan kinerja yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan atau omset yang masuk, baik secara finansial maupun jaringan. Kemajuan yang paling terlihat ialah pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data menjadi informasi akan menjadi cepat dan dapat dilakukan secara otomatis. Tentu saja untuk menjamin kualitas dari hasil pengelolaan teknologi informasi harus dilakukan rangkaian pengujian sebelum digunakan ataupun diterapkan.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Thomson mengemukakan ”pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan”. Sedangkan Mortensen mengemukakan “bahwa teknologi informasi telah menjadi satu yang tidak terpisahkan dari mekanisme kantor. Walaupun banyak program

²Tri Rachmadi, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Tiga Ebook, 2020), h. 2.

yang tersedia, namun akan sulit sekali jika digabung dengan personel yang tidak terlatih”.³ Pemahaman secara lengkap dari sistem merupakan kunci dari efektivitas dari penggunaan sistem tersebut.

2. Perencanaan Pembangunan

a. Pengertian Perencanaan

Rencana adalah hasil dari proses perencanaan dokumen-dokumen yang menunjukkan berbagai detail konfigurasi ruang dan infrastruktur yang diinginkan dari perkembangan kota dimasa depan. Rencana biasanya disajikan dalam bentuk peta/gambar yang disertai dengan teks yang menerangkan rasionalisasi rencana berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada saat ini dan analisis pada kecendrungan pada masa depan. Ada empat rencana pembangunan perkotaan yaitu:

1) Rencana Struktur (*structure plan*)

Rencana struktur adalah dokumen rencana yang mencakup area geografis yang meliputi seluruh wilayah dan kota. Rencana ini memberikan indikasi yang lengkap tentang pertumbuhan ruang dan karakteristik penggunaan lahan pada masa depan secara mendetail.

2) Rencana Induk (*master plan*)

Rencana induk disusun untuk menetapkan penggunaan lahan secara administratif dalam konteks manajemen perkotaan, mengenai kategori penggunaan lahan, kepadatan dan tinggi bangunan, dan standar-standar lainnya dalam pembangunan perkotaan. Rencana induk berfungsi sebagai kerangka kontrol dalam peruntukan dan pemanfaatan lahan.

3) Rencana Teknis (*technical plan*)

Rencana teknis merupakan dokumen terinci tentang biaya dan pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Rencana teknis atau rencana tahunan merupakan kerangka bagi pekerja aktual yang harus dilakukan dan memonitor kemajuan fisik dan finansial dari suatu proyek.

³Tjhai Fung Jin “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruh Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akutansi Publik”, Jurnal Bisnis Dan Akutansi, Vol.5, No. 1, April 2003, 1-26, h. 3.

kebaikan yang sempurna, jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya maka ditulis sebagai satu kejelekan”. (Matan lain: Muslim 187, Ahmad 1897, 3288).

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa seorang muslim harus mempunyai rencana/planning dalam segala hal yang baik, apalagi dalam sebuah hadis atau perusahaan, bahkan dalam hadis tersebut digambarkan dengan hitungan matematis, yaitu 1 kebaikan ditulis 10 kebaikan. Hal ini dapat diartikan, planning yang baik akan menghasilkan laba yang baik, tentu saja tidak cukup hanya planning, tanpa diaktualisasikan. Jika planning yang baik itu dilaksanakan maka laba yang akan diperoleh akan berlipat-lipat. Sebaliknya, jika planning yang dilaksanakan itu jelek maka akan mengalami kerugian.⁶

Planning adalah kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapat hasil yang optimal. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil yang ingin dicapai
- 2) Orang yang akan melaksanakan
- 3) Waktu dan skala prioritas
- 4) Dana atau modal

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka terdapat empat elemen dasar dalam perencanaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Merencanakan berarti memilih
- 2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
- 3) Perencanaan merupakan alat dalam mencapai tujuan
- 4) Perencanaan untuk dimasa yang akan datang.

Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah kedalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Di dalam perencanaan, karena berlandaskan kaidah ilmiah, senantiasa

⁶Sri Harmonika, *Hadist-Hadist tentang Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jurnal At-Tadair Vol 1, No 1, 2017, h. 8.

diizinkan terjadi perubahan dalam rangka menuju atau mendekati cita-cita yang lebih baik. Adapun sarannya adalah tercapainya suatu kearifan hasil dari pemikiran yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Perencanaan juga diartikan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan sosial, atau saran politik, dan mungkin pula saran militer. Ada yang berpandangan sempit bahwa campur tangan pemerintah yang diterapkan dalam pembuatan perencanaan pembangunan ekonomi, seperti yang ditujuakan dalam sistem ekonomi sosialisme, komunisme atau dalam sistem ekonomi terpimpin.⁷ Tetapi kenyataannya dalam sistem ekonomi kapitalis, ekonomi campuran, atau dalam sistem ekonomi apapun, diperlukan perencanaan ekonomi, karena perenannya sangat penting, terutama ditunjukkan dalam upaya memanfaatkan input yang tersedia untuk menghasilkan autput yang efektif dan efisien. Pada akhirnya, sampai sekarang peranan ekonomi telah dilaksanakan dan diterapkan secara luas dalam berbagai bidang pembangunan.

Mengingat sangat pentingnya peran perencanaan dalam pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan defenisi perencanaan menurut beberapa pakar, yang berbeda-beda perekanannya satu sama lain, namun sasaran akhirnya menunjukkan kesamaan, yaitu pencapaian hasil pembnagunan yang lebih baik. Dr. Daltom berpendapat bahwa perencanaan ekonomi adalah pengaturan sengaja oleh pihak yang berwenagng sumber-sumber daya kegiatan ekonomi kearah tujuan yang ditetapkan. Salah satu defenisi yang sangat populer adalah yang dikemukakan oleh Dickinson, yang mendifinisikan perencanaanm sebagai pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana bila dan dimana akan diproduksi, serta untuk siapa, akan dialokasikan, oleh lembaga pengambilan keputusan yang berwenang atas dasarpengamatan yang menyeluruh terhadap sistem prekonomian sebagai satu kesatuan dalam jangka waktu tertentu.

b. Pengertian pembangunan

⁷Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 89.

Pengertian pembangunan adalah proses perubahan yang terjadi terus menerus untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi ketika melakukan pembangunan adanya sesuatu hal yang berubah dan berbeda. Jika tidak terjadi perubahan sama sekali berarti belum disebut sebagai pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam pembangunan (development) terkandung unsur-unsur:

- 1) Perubahan: yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
- 2) Tujuan: yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan
- 3) Potensi: yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.⁸

Menurut Lewwellen, Larrin, Kiely dalam Tikson teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*). Sedangkan menurut Tikson membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan.

Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan

⁸Wayan Dedi Juniawan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 5, No 3, 2019, h. 287.

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.⁹

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Sedangkan dalam Islam, pembangunan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya agama (*hifz ad-din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*) yang biasa disebut dengan maqasid syari’ah. Dengan demikian kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah sebuah kondisi dimana maqasid syari’ah terjamin keberadaannya dalam kehidupan manusia.¹⁰

Salah satu tujuan utama dilakukannya perencanaan ekonomi adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, (dalam arti peningkatan output nasional) diperlukan dengan pembentukan modal yang cukup besar. Pembentukan modal tergantung pada tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi. Di negara-negara berkembang, tingkat pendapatan secara perkapita adalah rendah, sebagian besar pendapatan keluarga digunakan untuk konsumsi, sisanya adalah tabungan. Tingkat tabungan yang sangat rendah, akan menghasilkan investasi yang dengan demikian tingkat pembentukan modal akan rendah dan produktivitas akan rendah pula untuk mengatasi kendala yang bersifat lingkaran setan (*vicious circle*) ini dapat ditempuh dengan melaksanakan pembangunan ekonomi berencana. Perencanaan

⁹Kabupaten Buleleng “Teori Dan Indikator Pembangunan” (<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>, Diakses pada 15 Februari 2017, 2017). Diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

¹⁰Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner* (Perdana Publishing, Medan: 2018), h. 8.

pembangunan ekonomi agar disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi seluruh sektor perekonomian dan meliputi seluruh wilayah di tanah air.¹¹ Sehingga pembangunan dapat berjalan secara merata dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat setempat.

c. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan sumber daya dalam pembangunan merupakan suatu yang tidak diperdebatkan karena sumberdaya alam adalah input yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi suatu yang baru. Baik buruknya lingkungan dimasa depan bergantung pada usaha-usaha generasi sekarang dalam mengelola sumber daya alam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يُلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.
رواه البخاري

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "jika ada salah seorang dari kalian makan, maka janganlah mengelap tangannya sampai ia menjilatnya atau menjilatkannya (kepada orang lain)". Hadits diriwayatkan oleh Bukhari

Nabi Muhammad SAW sangat menyadari, bahwa pembangunan tanpa penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif tidak mungkin terlaksana. Dalam pengarahan-pengarahan beliau terhadap sahabat-sahabatnya, beliau membangun suatu sikap tentang penggunaan sumber daya secara efisien. Dari masalah-masalah kecil itulah seperti menghabiskan sisa-sisa makanan di anak jari untuk menerangkan secara eksplisit larangan pembuangan apa saja yang bernilai.¹²

Perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang didesentralisasikan, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan daerah

¹¹Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 91.

¹²Isnaini Harahap, et al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 251.

otonomi, yang diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola dan mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana pembangunan daerah (kabupaten/kota) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) setelah memperhatikan materi yang diusulkan oleh Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Rencana pembangunan kabupaten merupakan rencana yang disusun dari bawah (*bottom-up planning*).¹³

Adapun jenis-jenis rencana pembangunan sebagai berikut:

1). Rencana pembangunan jangka panjang

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPP adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMP adalah dokumen perencanaan pembangunan provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan.

- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

¹³Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 96.

- c) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3). Rencana Pembangunan Tahunan

- a) Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- b) Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

d. Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dijelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam proses perencanaan yaitu:

1) Pendekatan politik

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

2) Perencanaan dengan pendekatan teknokratik

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3) Perencanaan dengan pendekatan partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4) Perencanaan dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*

Sedangkan pendekatan atas-bawah/*top-down* dan bawah-atas/*bottom-up* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.¹⁴ Semua pendekatan ini harus dijalankan dalam merumuskan sebuah perencanaan pembangunan agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

Suwono menjelaskan bahwa pembangunan seharusnya berorientasi kepada prinsip keterbawasertaan. Prinsip ini meniscayakan partisipasi dan emansipasi rakyat dalam setiap kemajuan pembangunan. Kemajuan pembangunan harus bergerak simetris dengan kemajuan ekonomi rakyat. Sebaliknya pembangunan tidak seharusnya menyisakan eksklusivisme, marginalisasi, aliansi atau penyingkiran terhadap masyarakat miskin dan lemah. Partisipasi dan emansipasi masyarakat dalam pembangunan, pada akhirnya akan mewujudkan sebuah proses *trickle-up effect*, suatu keadaan di mana rakyat akan memberikan dukungan terhadap ekonomi nasional dan meninggalkan *trickle-down effect*¹⁵.

e. Beberapa Jenis Perencanaan Ekonomi

1) Perencanaan sistem Komando

Perencanaan dengan komando tidak menghendaki adanya liberalisme. Pemerintah pusat yang merencanakan, mengatur dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas sesuai yang telah ditentukan sebelumnya bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan sektor perekonomian.

Kelemahan sistem perencanaan komando adalah:

- a) Sama sekali tidak ada kedaulatan konsumen, tidak ada kemerdekaan ekonomi, pasar konsumen dan pasar tenaga kerja ditentukan oleh penguasa perencanaan.

¹⁴Pendekatan perencanaan Pembangunan NKRI
(<https://www.slideshare.net/qiuel/pendekatan-perencanaan-pembangunan>), 29 Agustus 2013, 2013.

¹⁵Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi*, (Medan: Febi UINSU Press, 2016), h. 77.

- b) Hasil perencanaan komando selalu menimbulkan kelangkaan pada beberapa barang dan surplus pada barang lainnya.
- c) Tidak ada kemungkinan untuk merubah satu bagianpun tanpa mengubah keseluruhannya, rencana harus dilakukan sebagai satu keseluruhan secara terpadu.
- d) Sistem perencanaan komando menimbulkan kecenderungan pemaksaan.

2) Perencanaan dengan Rangsangan

Perencanaan dengan rangsangan merupakan perencanaan demokratis, tidak ada keharusan, tetapi ajakan. Ada kebebasan usaha, kebebasan ekonomi dan kebebasan produksi mengikuti mekanisme pasar. Kelemahan perencanaan dengan rangsangan, misalnya:

- a) Perangsang ditawarkan mungkin tidak memadai bagi produsen dan konsumen untuk bertindak seperti yang diinginkan oleh pemerintah.
- b) Meskipun pelaksanaan rencana diserahkan pada kekuatan pasar, namun persesuaian antara permintaan dan penawaran sulit tercapai (kegagalan pasar).

3) Perencanaan Indikatif

Perencanaan indikatif telah diterapkan di Prancis sejak tahun 1947-1950. Sektor negara memegang peranan penting, mencakup sektor-sektor dasar seperti batu bara, semen, baja, transportasi, bahan bakar, peralatan pertanian, elektronik, pariwisata, dan lainnya. Pada sektor-sektor ini, pemenuhan sarana produksi dan investasi bersifat wajib.

4) Perencanaan Imperatif

Dalam perencanaan imperatif semua kegiatan dan sumber perekonomian berjalan menurut komando negara, ada pengawasan secara menyeluruh oleh negara terhadap faktor produksi. Keseluruhan sumber daya dipakai semaksimal mungkin untuk memenuhi sasaran rencana. Tidak ada kedaulatan konsumen, konsumen mendapatkan barang-barang dalam jumlah tertentu dan harga tertentu.

5) Perencanaan Demokratis

Dasar ideologi dalam pelaksanaan perencanaan demokratis adalah filsafat pemerintahan demokratis. Rakyat dilibatkan dalam setiap langkah perumusan dan pelaksanaan rencana. Rencana dibahas dalam parlemen (badan legislatif), dapat diterima, ditolak atau diubah oleh parlemen (DPR). Jadi rencana tidak dipaksakan kepada rakyat dari atas, pada dasarnya merupakan perencanaan dari bawah (bottom-up planning).

6) Perencanaan Totaliter (Otoriter)

Dalam perencanaan totaliter (otoriter) terdapat pengawasan dan komando dari pusat mengenai segala kegiatan ekonomi sesuai dengan rencana tunggal dimana konsumsi, produksi, pertukaran dan distribusi, semuanya diawasi oleh negara. Penguasa perencanaan merupakan badan tertinggi, yang menetapkan sasaran, skema, alokasi, metoda dan prosedur pelaksanaan rencana. Sama sekali tidak ada oposisi di dalamnya. Rakyat harus menerima dan melaksanakan rencana tersebut apa adanya. Tidak ada kebebasan demokratis.

7) Perencanaan yang Disentralisasikan

Dalam perencanaan yang disentralisasikan, keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada dibawah badan perencanaan pusat. Badan ini merumuskan suatu rencana pusat, menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas untuk setiap sektor perekonomian. Semua keputusan investasi diputuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana. Masalah-masalah pokok perekonomian apa dan berapa banyak akan diproduksi, dan kepada siapa akan dialokasikan. Semua diputuskan oleh badan tersebut, yang mengendalikan setiap aspek perekonomian, menetapkan harga semua produk dan upah dari semua jenis kerja. Perencanaan yang disentralisasikan sifatnya tidak demokratis dan kaku.

8) Perencanaan yang Didesentralisasikan

Perencanaan yang didesentralisasikan mengacu pada pelaksanaan rencana dari bawah (bottom-up planning). Rencana dirumuskan oleh badan perencanaan pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unit administrative negara. Rencana pusat menggabungkan rencana negara-negara bagian (provinsi-provinsi), dan (dan

rencana negara bagian (provinsi) menggabungkan rencana tingkat desa.¹⁶ Perencanaan yang didesentralisasikan lebih baik dibandingkan daripada perencanaan yang disentralisasikan dalam hal menyangkut kebebasan ekonomi dan fleksibilitas perekonomian, tetapi ketergantungan pada mekanisme pasar dapat menimbulkan kelangkaan dan kelebihan produksi barang dan jasa. Dalam perencanaan yang disentralisasikan memberikan keterpaduan perencanaan, sedangkan perencanaan yang didesentralisasikan memberikan kebebasan ekonomi dan rangsangan kepada perekonomian pasar.

3. Sistem *E-Planning*

a. Pengertian sistem

Apa yang dimaksud dengan sistem (*system*)? Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ada juga yang mengatakan definisi sistem adalah suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur/ elemen yang dihubungkan menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan aliran informasi dan materi/ energi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Secara etimologis, istilah “sistem” berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) yang sering dipakai untuk memudahkan dalam menggambarkan interaksi di dalam suatu entitas. Istilah “sistem” sering digunakan dalam berbagai bidang, sehingga maknanya akan berbeda-beda sesuai dengan bidang yang dibahas. Namun, secara umum kata “sistem” mengacu pada sekumpulan benda yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Agar lebih memahami apa itu sistem, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

1) Harijono Djojodihardjo

¹⁶Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2013), h. 94.

Menurut Harijono Djojodihardjo, pengertian sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.

2) Indrajit

Menurut Indrajit, pengertian sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

3) Jogianto

Menurut Jogianto, definisi sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menggambarkan berbagai kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.¹⁷

b. *E-Planning*

E-planning atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah alat penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

E-planning menurut Silva adalah sebuah paradigma perencanaan baru yang muncul dalam kaitannya dengan penggunaan secara luas teknologi informasi dan komunikasi (khususnya internet, sistem informasi geografis dan teknologi virtual reality) dari sistem perencanaan berbasis kertas/ manual sebagai sistem perencanaan konvensional. *E-planning* juga sering disinonimkan sebagai *e-government* atau pemerintahan digital yang digunakan pada bidang perencanaan kota dan daerah.¹⁸

¹⁷Pengertian Sistem, “*Definisi, Unsur-Unsur, dan Jenis-Jenis Sistem*” (<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-sistem.html>). Diunduh pada tanggal 20 Februari 2020.

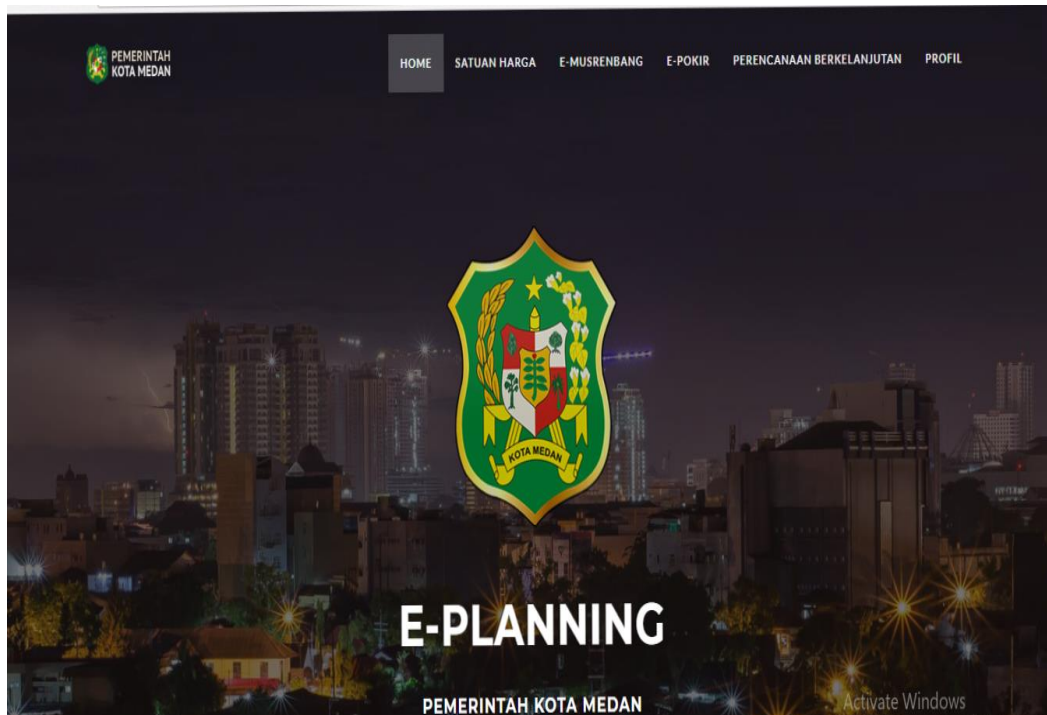
¹⁸Wayan Dedi Juniawan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 5, No 3, 2019, h. 288.

Suatu sistem yang digunakan untuk pengolahan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *e-planning* ini diharapkan BAPPEDA dapat mengoptimalkan dan menyajikan analisa yang sangat penting bagi para stakeholder. *E-planning* menjadi alat bantu BAPPEDA dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja OPD sehingga Secara umum tujuan penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah adalah:

- 1).menghasilkan program perencanaan dan pembangunan daerah, yang terintegrasi dalam sistem on-line dan off-line. Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- 2).Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
- 3).Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.
- 4).Terciptanya interaksi dan sistem informasi yang melebarkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- 5).Secara bertahap untuk meningkatkan citra aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat yang dapat bekerja lebih efisien, efektif dan professional.
- 6). Terciptanya kemudahan bagi aparat pemerintah dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.

c. Tampilan Utama Sistem *E-Planning*

Berikut ini adalah tampilan utama aplikasi *E-Planning* Pemerintah Kota Medan.



Dalam sistem aplikasi *E-Planning* terdapat 4 modul, diantaranya:

1) Satuan Harga

Yaitu aplikasi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standard Biaya (ASB).

2) E-Musrenbang

Yaitu aplikasi pelaksanaan rembuk warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD sampai dengan Penyusunan Pra RKA OPD.

3) E-Pokir

Yaitu aplikasi pokok pikiran anggota DPRD Kota Medan.

4) Perencanaan Berkelanjutan

Yaitu aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Nama penulis Egis Teknotat Grandis dengan judul penelitian Efektivitas Penerapan Sistem *E-Planning* Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Efektifitas sistem *e-planning* program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan dari OPD sudah dilakukan dengan baik. Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem *e-planning* terkunci dan terdokumentasikan berupa softcopy, mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam meng-input data sehingga adanya pengurangan biaya. Hal ini cukup direspon dengan baik oleh pegawai dari masing-masing OPD, karena adanya pertanggung jawaban mengintegrasikan antara program yang diusulkan dengan alokasi anggaran, sehingga adanya kesinergisan antar asistem aplikasi lama dengan sistem aplikasi *e-planning* yakni berfungsi sama mengusulkan program prioritas.
 - b. Hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Banjar antara lain: terhambat dengan kurang mampuan dan kurang pahaman pegawai OPD dalam menerapkan sistem *e-planning*, serta kurang terintegrasinya *e-planning* antara SIMDA, Patroman, dan Kresna Sistem.

- c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam efektivitas penerapan sistem *e-planning* di BAPPEDA Kota Banjar dilakukan dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, dan latihan kepada OPD dalam menerapkan sistem *e-planning* dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas OPD dalam mengintegrasikan sistem sebelumnya yakni SIMDA, Patroman sistem, dan Kresna sistem.¹⁹

Disini penelitian terdahulu lebih memfokuskan sejauhmana efektifitas penerapan sistem *e-planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar dengan menggunakan teori Gibson et al. Sedangkan penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu namun penulis memfokuskan pemanfaatan sistem *e-planning* dengan menggunakan teori Thomson et al yang diterapkan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yang digunakan oleh pegawai.

2. Nama penulis Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli dengan judul penelitian Analisis Penerapan *e-planning* dan E-Budgeting Pada Pemerintah Daerah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis, baik SDM yang potensial dalam pengelolaan aplikasi itu sendiri maupun SDM yang mau konsen di bagian perencanaan dan penganggaran dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - b. Kabupaten Bengkalis juga masih dihadapkan dengan keterbatasan infrastruktur dalam hal ini ketersediaan jaringan, sehingga penerapan *e-*

¹⁹Egis Teknotat Grandis, "Efektifitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar", h. 120.

planning dan E-budgeting hanya bias di akses di tempat tertentu saja yaitu BAPPEDA dan BPKAD.²⁰

Disini penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada dua aplikasi yaitu penerapan sistem *e-planning* dan E-Budgeting sejauh mana manfaatnya untuk OPD Kabupaten Bengkalis. Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan pemanfaatan sistem *e-planning* saja yang diterapkan dalam badan perencanaan pembangunan kota medan yang digunakan oleh pegawai BAPPEDA Kota Medan.

3. Nama Peneliti Wayan Dedi Juniawan dengan judul penelitian Sitem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan *e-planning* (Studi Kasus pada BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Gianyar). Dengan hasil penelitian sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 telah mengadopsi system perencanaan pembangunan terintegrasi sesuai yang dikemukakan oleh Geyer dimana setiap fasenya bersesuaian dengan tahapan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Setiap tahapan penyusunan pada RPJMD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sudah merupakan bagian dalam fase system perencanaan pembangunan terintegrasi, walaupun pada setiap tahapannya tidak berurutan dalam setiap fase sistem PPT. *E-planning* berperan pada fase 0 (persiapan) dalam mengumpulkan data dan iformasi pembangunan yang diterapkan oleh peraturan fase 2 (strategi) pada saat pemasukan dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, serta fase 4 (integritas), yaitu mengintegrasikan misi, tujuan, sasaran, sampai pada program daerahd engan program pada Renstra Perangkat Daerah.
 - b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul adalah faktor teknis (infrastuktur TIK, keamanan, output dan fitur sistem, SOP, dan

²⁰Virginia Ningsih, Ria Nelly Sari dan Muhammad Rasuli, “*Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pada Pemerintah Daerah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*”, Jurnal Ekonomi, Vol 26, No. 2, Juni 2018, h. 30.

pelatihan teknis) dan faktor sosial/organisasi (komitmen pimpinan, budayakerja, komunikasi dan SDM pelaksana). Satu faktor dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat proses implementasinya. Faktort eknis yang termasuk faktor pendukung, adalah infrastuktur TIK, keamanan, output, dan fitur sistem. Sementara kelima faktor lainnya dapat berperan sebagai faktor penghambat. Faktorsosial/organisasi dari keempat faktor yang ada memiliki kontribusi menjadi faktor pendukung dan penghambat.²¹

Disini penelelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada sistem perencanaan pembangunan yang terintregrasi mulai dari Renja, RPJMD, RPJPD Kabupaten Gianyar dengan penerapan *e-planning*. Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan pemanfaatan sistem *e-planning* saja yang diterapkan dalam badan perencanaan pembangunan kota medan yang digunakan oleh pegawai BAPPEDA Kota Medan.

4. Nama peneliti Samsul Ma'arif, Pribadi Nugroho dan Lydiya Wijayanti dengan judul penelitian Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. Dengan hasil Penelitian sebagai berikut:

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. . Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (*top-down planning*) yang antara lain ditandai dengan penyeragaman (*uniformity*) pendekatan

²¹Wayan Dedi Juniawan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 5, No 3, 2019, h. 292.

perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi. Disatu sisi, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang melibatkan proses Musrenbang harus memenuhi prinsip *participative*, prinsip *sustainable*, dan prinsip *holistic*. Kondisi seperti ini yang membuat efektivitas Musrenbang patut dipertanyakan.²²

5. Nama peneliti Dian Purnama Sari Dhamayanti dengan judul penelitian Analisis Penerapan SIMRAL di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Deskripsi hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori penerapan *e-government*. Dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Disini peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian guna mengetahui bagaimanakah penerapan Simral di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang dan mengaitkannya dengan fakta dilapangan serta bagaimanakah perubahan yang dihasilkan dengan adanya penerapan simral di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah hasil temuan-temuan peneliti dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai

²²Samsul Ma'arif, Pribadi Nugroho dan Lydiya Wijayanti, *Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang*, Riptek, Vol. 4, No. 11, Tahun 2010, h. 53.

berbagai permasalahan dalam penerapan Simral di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.²³

Peneliti terdahulu disini menggunakan teori Richardus Eko Indrajit tentang indikator penerapan *e-government*, yaitu: *content Deevlopment, Copetency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interfaces, Capital* dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan . Sedangkan penelitian ini penulis memfokuskan tentang pemanfaatan sistem *e-planning* dengan menggunakan teori Thomson et al yang menggunakan indikator, intensitas, frekuensi dan jumlah yang diterapkan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yang digunakan oleh pegawai.

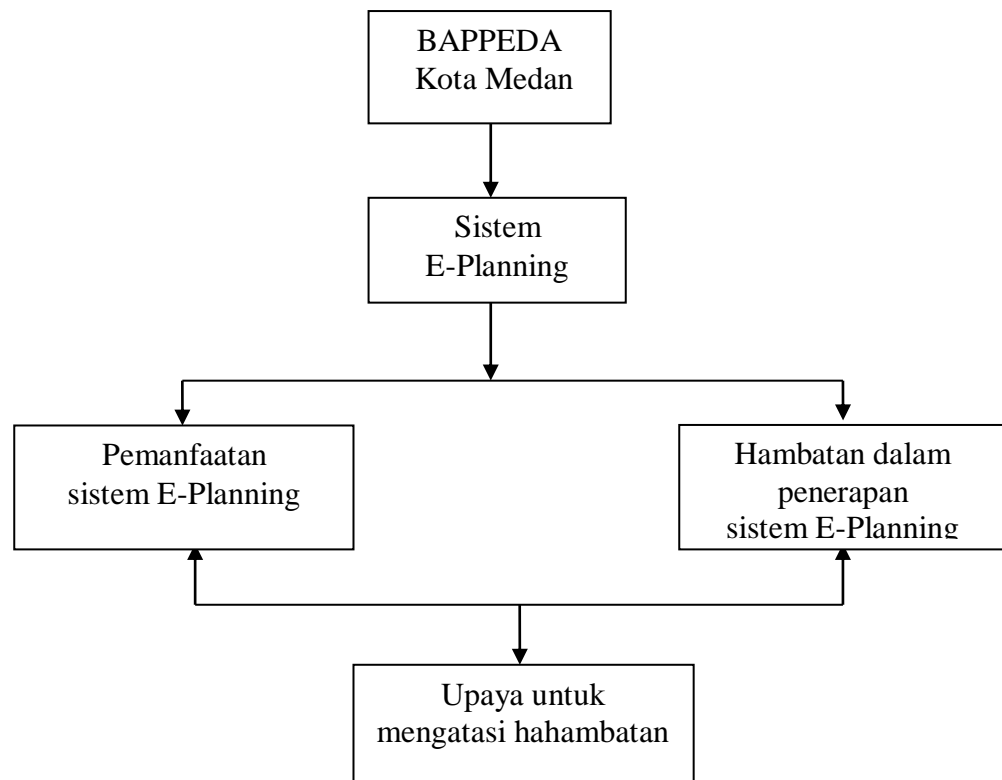
C. Kerangka Penelitian

Untuk memperjelas jalannya penelitiannyang akan dilakukan, para calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran menyangkut kosep tahapan-tahapan penelitian secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema tersebut menjelaskan mekanisme kerj yang timbul secara singkat. Dengan demikian, gambar jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui dengan jelas dan terarah.

Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.²⁴ Dibawah ini merupakan kerangka teoritis yang dibuat untuk mempermudah jalannya penelitian.

²³Dian Purnama Sari Dhamayanti, *Analisis Penerapan SIMRAL di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2019), h. 82.

²⁴Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 30.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Keterangan Bagan:

Kerangka teori dari penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi dari sistem *e-planning*, kemudian pemanfaatan sistem *e-planning*, apa saja hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sesuai dengan implementasinya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancan yang sebenarnya.¹ Mengingat penelitian ini adalah penelitian menggunakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data-datanya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Selain lapangan, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat penulis.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ataupun masa lampau.² Karena peneliti bermaksud menemukan, memahami dan memperoleh gambaran, mendeskripsikan dan menganalisa tentang fenomena-fenomena yang tersembunyi di balik sistem perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *e-planning* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan. Yang menjelaskan bahwa penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

¹Sumadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

²Juliansyah Noor, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam didalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.³ Dalam hal ini, data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan. Adapun daftar para responden atau objek yang dibteliti sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Siti Khalijah	Perempuan	Kepala Bag Umum BAPPEDA Kota Medan
2	Taufik Teguh Pribadi	Laki-Laki	Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan
3	Adi Saputra Lubis	Laki-Laki	Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan
4	Nabil Munawar	Laki-Laki	Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian penulis menggunakan metode:

1. Interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.⁴ Dan penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai yang berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan. Sebagai pendukung penulis menggunakan metode dokumentasi.

³Kartini Kurtono, *"Pengantar Metode Riset"*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 57.

⁴Juliansyah, Noor, *"Metode Penelitian"*, (Jakarta: Kencana 2011), h. 141.

C. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah “menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan yaitu menggolongkan dan menyusun menurut aturan tertentu. Setelah sumber dari berbagai data di kumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian data dapat di lakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.

2. Tabulasi Data (*Tabulating*)

Tabulating adalah proses penyusunan data atau fakta yang telah di edit dan di beri kode dalam bentuk tabel. Dari berbagai data dan teori yang telah di kumpulkan, apabila dalam pembahasan tersebut di perlukan untuk di buat tabel, maka hal tersebut berguna untuk mempermudah bagi semua pembaca dalam memahami pembahasan yang di jelaskan dalam penelitian ini.

3. Rekonstuksi Data (*reconstruction*)

yaitu menyusun ulang data secara teratur, sehingga mudah untuk difahami

4. Sistemasi Data (*systematizing*)

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.⁵

Dari seluruh data atau laporan yang di peroleh yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka langkah selanjutnya akan di olah dan di susun, kemudian penulis akan menggunakan langkah editing atau meneliti kembali catatan yang telah di kumpulkan untuk mengetahui apaakah data tersebut cukup akurat dan dapat di siapkan untuk menyempurnakan penelitian.

⁵*Ibid*, h. 126

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶Setelah keseluruhan data terkumpul dan di olah dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷

⁶Soerjono Soekanto “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 12.

⁷Juliansyah Noor “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 32.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta Kota Medan

Kota Medan yang menjadi Ibu kota Propinsi Sumatera Utara. Secara geografis kota Medan terletak pada $3^{\circ} 30' - 3^{\circ} 43'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, sehingga Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang terletak di Kantor Walikota Medan memiliki tugas membantu Walikota Medan untuk menentukan arah dan kebijakan dibidang perencanaan dan pembangunan kota. Sesuai dengan pasal 109 dan 110 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, Telah diatur tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut diatas, Bappeda Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan kota
4. Melaksanakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bappeda Kota Medan memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

1. Fungsi koordinasi perencanaan kota
2. Penyediaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kota

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Bappeda Kota Medan mempunyai fungsi (sumber Bappeda) sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan kota.

2. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan kota jangka panjang dan kota jangka menengah (lima tahun).
3. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1. Sejarah Singkat Intansi

Bappeda berdiri pada tahun 1986 di jurnalistik Medan dan kemudian ke Gelanggang Remaja dan pada tahun 1991 pindah ke Kantor Walikota Medan Bappeda Kota Medan sebagaimana termasuk dalam pada Kota Medan Nomor 5 tahun 2001 dan keputusan Walikota Medan. Bappeda memiliki tugas membantu Walikota Medan untuk menentukan arah dan kebijakan di bidang Bappeda Kota serta penilaiannya. Bappeda Kota Medan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Medan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah Perencanaan Bappeda Kota Medan tertuang dalam dokumen perencanaan strategi untuk priode 5 tahun terhitung sejak tahun 2001 sampai 2005 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, dan program yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rapat Kerja Nasional, Tugas Akhir masa jabatan Walikota Medan, Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan, Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda, Pelaksanaan Koordinasi Tata Laksana dan Tata Ruang, Pengkoordinasian Lingkup Kota, Industri, Perekonomian, Rencana Anggaran Belanja Negara (RABN), Sumber Daya Alam (SDA), Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan Kota Medan (Kota, Kecamatan, Kelurahan dan lingkungan).

2. Visi dan Misi BAPPEDA Kota Medan

Berdasarkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021 maka visi pembangunan kota

tahun 2016-2021 ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagai berikut:

“MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS”

Misi Pembangunan Kota oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
- b. Menumbuh kembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
- c. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
- d. Menyelenggarakan tat ruang Kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infastruktur dan utilitas Kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
- e. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- f. Mengembangkan keperibadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

3. Logo dan Struktur Organisasi

a. Logo Bappeda Kota Medan



Gambar 4.2. Logo Bappeda Kota Medan

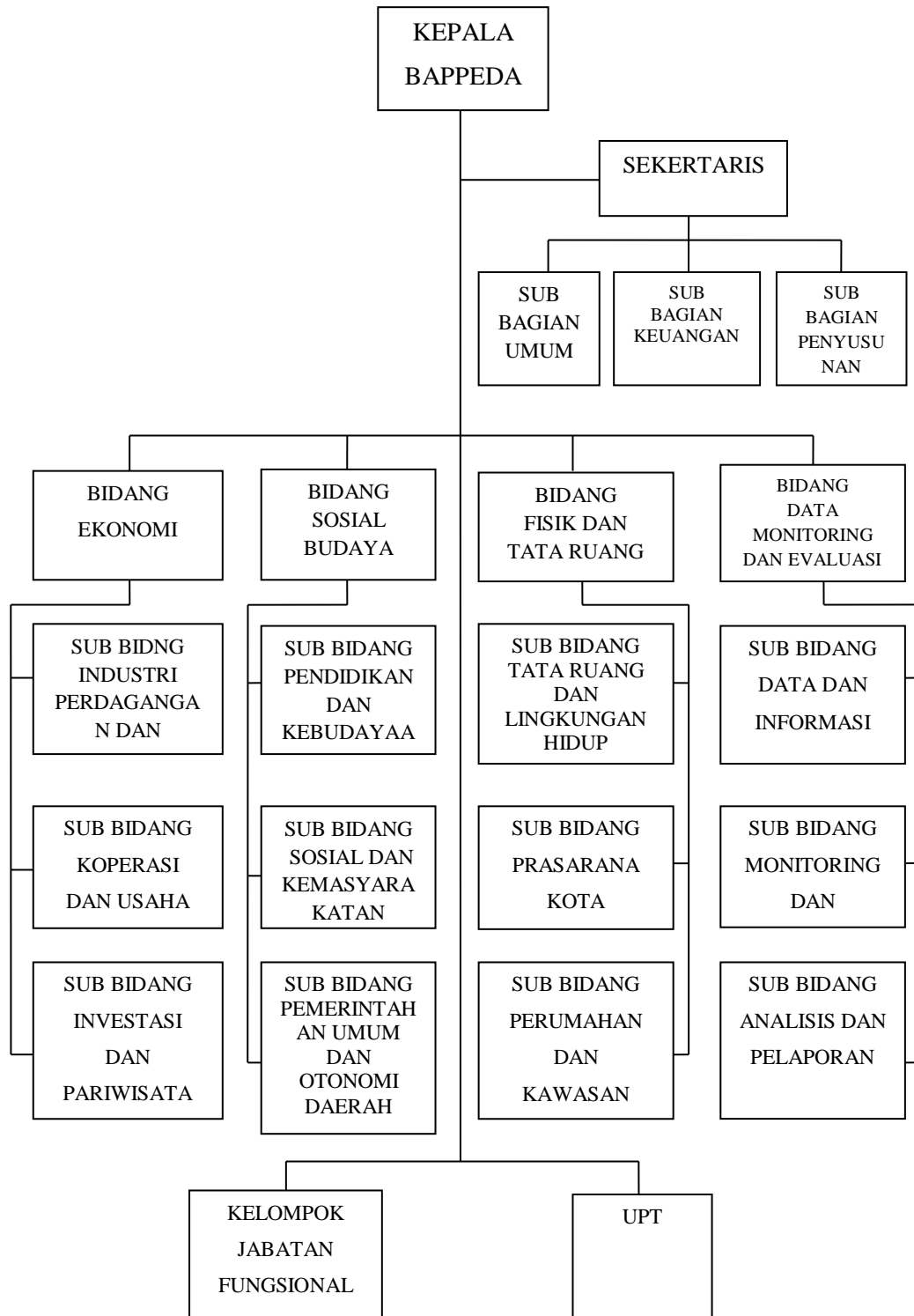
b. Struktur Organisasi Bappeda Kota Medan

Struktur Organisasi Bappeda Kota Medan ini dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 4 Maret 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Secara umum, rencana strategi Bappeda Kota Medan dalam tahap implementasi pelaksanaan akan dikelola oleh seluruh jajaran aparatur Bappeda Kota Medan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Bappeda
- 2) Sekertaris, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Bidang Ekonomi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Industri Perdagangan dan Pertanian
 - b) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - c) Sub Bidang Investasi dan Pariwisata

- 4) Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a) Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - c) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
- 5) Bidang Fisik dan Tata Ruang, membawahi:
 - a) Sub Bidang Prasarana Kota
 - b) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 - c) Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 6) Bidang Data Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 - a) Sub Bidang Data dan Informasi
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan

Dibawah ini merupakan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Medan

4. Ruang Lingkup Bidang Kegiatan

a. Kepala Bappeda

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bappeda yang bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan kota Medan.

b. Sekertaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengolahan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program badan.
- 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan badan.
- 4) Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas badan sub bidang.
- 6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditentukan.

c. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi di pimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Ekonomi.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan kota lingkup industri, perdagangan, pertanian, koperasi, dan usaha kecil menengah.
- 3) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan.
- 4) Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan.
- 5) Pelaksanaan investarisasi permasalahan ekonomi, merumuskan langkah-langkah, dan kebijakan pemecahannya.
- 6) Pengkoordinasian dan melaksanakan sosialisasi rencana kerja tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian dan kelautan, perindustrian dan perdagangan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi usaha mikro dan menengah, pendapatan, penanaman modal, ketahanan pangan, dan pelayanan perijinan terpadu dalam rangka melaksanakan program pembangunan kota atau program dan kegiatan yang perlu diusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang ekonomi.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial dan Budaya di pimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program kegiatan Bidang Sosial dan Budaya.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan kota lingkup sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan kota lingkup pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan kota lingkup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kemiskinan, dan keluarga berencana.
- 5) Pelaksanaan investaris permasalahan di bidang sosial dan budaya, merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pemecahannya.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang sosial dan budaya.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Fisik dan Tata Ruang

Bidang Fisik dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas lingkup prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok bidang fisik dan tata ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Fisik dan Tata Ruang.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan prasarana kota, tata ruang dan lingkungan hidup.

- 3) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana kota serta pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.
 - 4) Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan prasarana kota, tata ruang, dan lingkungan hidup yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 5) Pelaksanaan investarisasi di bidang fisik dan tata ruang, merumuskan langkah-langkah dan kebijakan pemecahannya.
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang fisik dan tata ruang.
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Data Monitoring dan Evaluasi

Bidang Data Monitoring dan Evaluasi di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab oleh Kepala Badan, mempunyai tugas lingkup data, mentoring dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Data Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana program, dan kegiatan Bidang Data Monitoring dan Evaluasi.
- 2) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan kota lingkup data, monitoring, dan evaluasi.
- 3) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sehubungan dengan kota medan.
- 4) Penyusunan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- 5) Pelaksanaan publikasi data dan informasi sesuai kebutuhan.
- 6) Pengembangan pusat data perencanaan daerah.
- 7) Pelaksanaan evaluasi data lingkup pembangunan kota medan.
- 8) Pelaksanaan hasil laporan penyelesaian akhir tahun.
- 9) Penyusunan laporan rapat kerja nasional.

5. Cara Kerja Sistem *E-Planning*

a. Pengoperasian *E-Planning*

Pengoperasian sistem aplikasi *E-Planning* tidak harus dibutuhkan sumber daya aparatur atau pegawai dengan kualifikasi bidang teknologi informasi melainkan bisa dari berbagai disiplin ilmu dengan syarat sudah pernah mengikuti pelatihan tentang *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan. Sumber daya aparatur yang bertugas mengoperasikan aplikasi *E-Planning* terdiri dari :

1) Koordinator

Koordinator disini adalah aparatur BAPPEDA Kota Medan yang menangani langsung *e-planning*. Koordinator tersebut mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan alat bantu *e-planning*.

2) Narasumber

Narasumber dibutuhkan sebagai tenaga pendamping dalam implementasi sistem aplikasi *e-planning*. Narasumber berasal dari konsultan atau pihak swasta yang menyediakan sistem aplikasi *e-planning* dan aparatur BAPPEDA Kota Medan yang menangani langsung sistem aplikasi *e-planning*.

3) Operator

Operator dibagi menjadi 2, yaitu : operator di BAPPEDA Kota Medan dan operator Organisasi Perangkat Daerah.

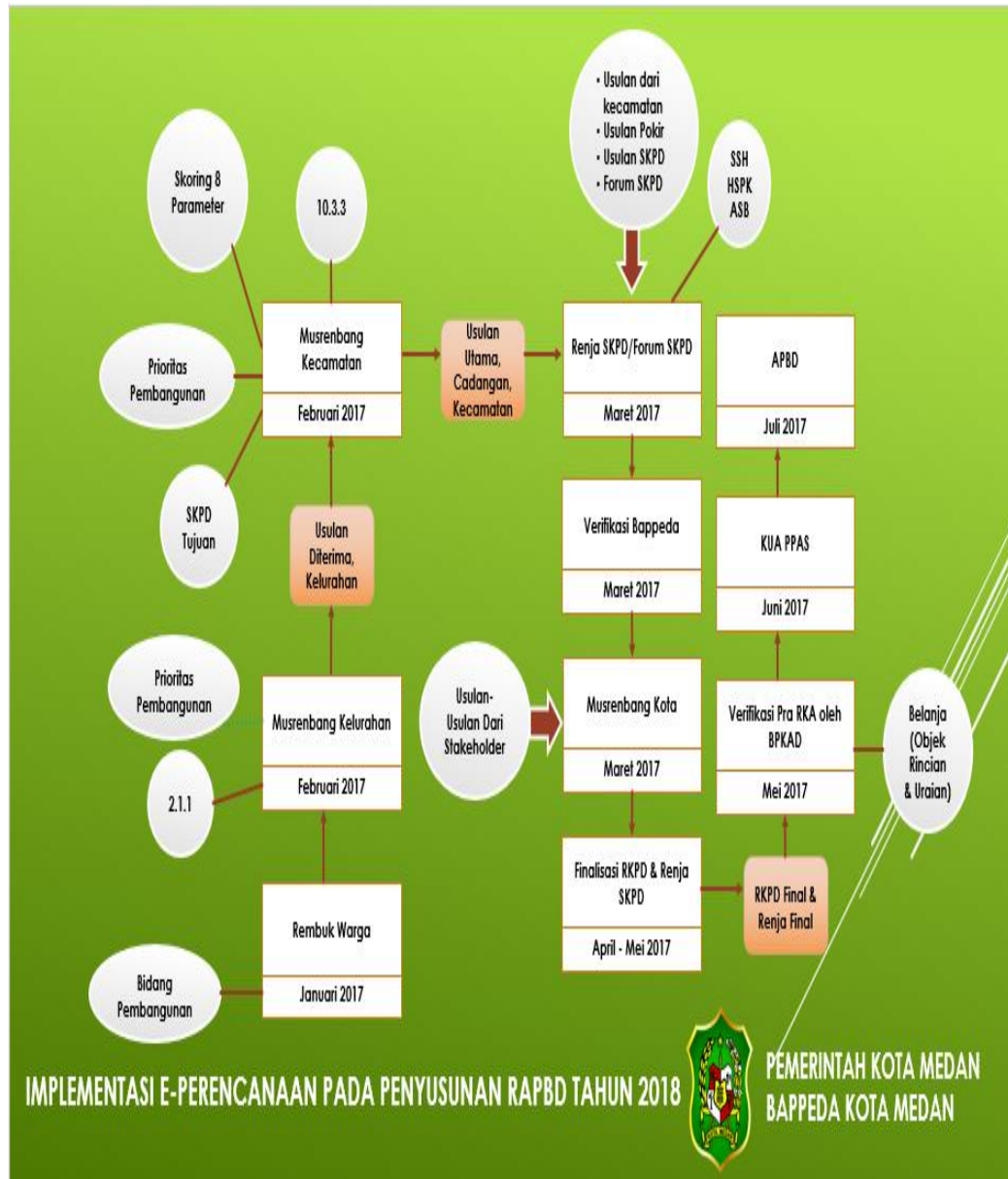
b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berbasis *E-Planning*

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga dalam penyusunannya harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Medan dapat dituangkan dalam modul aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah Kota Medan (*E-Planning*), yaitu sebagai berikut :

- 1).Pemasukan data Renstra
- 2).Pemasukan data Renja
- 3).Pemasukan data RPJMD
- 4).Pemasukan data RKPD dan Penerbitan KUA-PPAS¹

¹Rubiyanto, *Implementasi Kebijakan E-Ggovernment Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No. 2018, h. 41.

c. Implementasi E-Perencanaan



Gambar 4.4 Implementasi E-Perencanaan

Gambar diatas menunjukan implementasi dari sebuah aplikasi yang menunjukan dari mulai dari rembuk warga sampai, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan hingga sampainya kegiatan dapat diverivikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga program dan kegiatan dapat berjalan maka perencanaan tersebut terpantau diaplikasi e-perencanaan

B. Temuan Penelitian

1. Pemanfaatan Sistem *E-Planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Teguh Pribadi selaku Staf Sekertariat pada tanggal 21 Februari 2020 menyatakan bahwa:

*“Dalam pemanfaatan sistem e-planning sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin, ini karena sudah tanggung jawab kami sebagai perencanaan pembangunan Produktivitas BAPPEDA Kota Medan dalam menyusun sebuah program perencanaan pembangunan Kota Medan setiap tahunnya cukup meningkat sesuai perkembangan zaman, sebagian besar program dapat terlaksana dengan baik. Beliau juga mengatakan semua yang dilakukan oleh para pegawai sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Karena program yang diusulkan oleh BAPPEDA Kota Medan oleh cukup mendapat dukungan dari dinas/intansi serta DPRD”.*²

2. Hambatan Dalam Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Teguh Pribadi selaku Staf Sekertariat pada tanggal 21 Februari 2020 menyatakan bahwa:

*”Penerapan sistem e-planning di BAPPEDA Kota Medan pada awal penerapannya itu dimulai pada Tahun 2017, sejak itu Perencanaan Pembangunan sudah menggunakan sistem E-Planning. Dalam penerapannya sistem tidak mengalami kendala namun permasalahannya karena user tidak tepat waktu dalam penginputan dan sinkronisasi data. Dalam penerapannya penginputan data yang dilakukan dari pihak kecamatan harus dilakukan tepat waktu sehingga cepat segera di proses, tetapi masih saja yang terlambat. Pada dasarnya BAPPEDA Kota Medan ini sebagai perencanaan pembanguna sebelum dilakukannya pembangunan tersebut. Tidak semua yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan memiliki sumber daya yang sama, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya”.*³

Kemampuan setiap para pegawai tentunya tidak sama, Sumber Daya Manusia (SDM) belum merata dalam bidang perencanaan pembangunan. Bukan berarti sumber daya manusia tidak baik namun tidak semua dapat dikatakan diatas

²Taufik Teguh Pribadi Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan tanggal 21 Februari 2020.

³*Ibid*,

rata-rata. Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan sendiri para staf sudah baik namun masih kurang dalam bidang perencanaan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan apa yang terjadi permasalahan daerah saat ini agar kegiatan berikutnya dapat berjalan dengan baik. Seperti hasil dari wawancara oleh Adi Saputra Lubis selaku Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan yang menyatakan bahwa *“terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan karena tekanan politisi. Dengan adanya tekanan dari politisi maka akan sedikit dapat menghambat perencanaan tersebut.”*⁴

Seperti pernyataan dari Nabil Munawar selaku Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan menyatakan bahwa, *“Pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tak kenal henti. Untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan pada masyarakat dimasa yang akan datang baik perubahan moto hidup, perubahan sosial dan lingkungan hidup”.*⁵

Siti Khalijah selaku Kepala Sub Bagian Umum mengatakan, saat perencanaan pembangunan dilaksanakan seringnya perubahan yang terjadi tentu ini dapat mengganggu perencanaan pembangunan daerah yang sejak awal telah direncanakan.⁶

3. Upaya Yang Dilakuan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Khalijah selaku Kepala Sub Bagian Umum BAPPEDA Kota Medan pada tanggal 24 Februari 2020 menyatakan bahwa:

⁴Adi Saputra Lubis Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan, Tanggal 21 Februari 2020.

⁵Nabil Munawar Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan, Tanggal 21 Februari 2020.

⁶Siti Khalijah Kepala Bag Umum BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan, Pada Tanggal 24 Februari 2020.

Berkaitan dengan kurang meratanya Sumber Daya Manusia (SDM) maka langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan pelatihan. Dengan melakukan pembelajaran dan pelatihan maka akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pegawai itu sendiri, pelatihan-pelatihan yang dilakukan juga bekerjasama dengan lembaga lain juga guna membantu pemahaman aparatur pemerintahan daerah dan instansi terkait dalam melaksanakan peraturan pemerintah.⁷ Ini sangat penting dilakukan guna dapat pemerataan kemampuan pegawai dalam bidang perencanaan pembangunan.

Seperti hasil dari wawancara oleh Adi Saputra Lubis selaku Staf Sekertariat yang menyatakan bahwa:

"Penggunaan sistem e-planning yang diterapkan di BAPPEDA Kota Medan merupakan yang pertama setelah Kota Surabaya sehingga menjadikan Kabupaten/Kota percontohan dalam penerapan sistem E-Planning se-Indonesia. Dengan menggunakan aplikasi e-perencanaan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat membuat program sesuai dengan proses dan perencanaan yang baik juga. Dengan penerapan standar harga secara terperinci serta seluruh prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan sistem e-planning ini maka dapat mencegah program yang masuk ditengah-tengah ataupun menyusup seperti yang sering terjadi sebelum menggunakan sistem E-Planning ini. Sistem e-planning ini dapat mempermudah dalam penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan".⁸

Dengan banyaknya usulan perencanaan pembangunan baik dari pihak kecamatan maupun dari legislatif maka untuk mensinkronisasi suatu perencanaan dan memudahkan segala kegiatan *e-planning* adalah salah satu alat yang tepat saat ini.

Hasil wawancara dengan Taufik Teguh Pribadi selaku Staf Sekertariat pada tanggal 21 Februari 2020, *"cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Sistem e-planning ini dengan cara mengikuti*

⁷Siti Khalijah Kepala Bag Umum BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan, Pada Tanggal 24 Februari 2020.

⁸Adi Saputra Lubis Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan, Tanggal 21 Februari 2020.

*perubahan yang ada dengan cepat dan tepat. Hal ini agar para pegawai dapat meminimalisir kelemahan dalam yang ada”.*⁹

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Sistem *E-Planning* dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Terkait dengan pemanfaatan sistem *E-Planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, penulis menggunakan teori Thomson dan menguraikan pembahasannya sebagai berikut:

a. Intensitas

Salah satu hal yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan pemanfaatan suatu sistem informasi yaitu intensitas. Intensitas penggunaan sistem informasi mengacu pada seberapa sering pengguna memakai sistem informasi. Dalam kaitannya dalam hal ini penting untuk membedakan apakah pemakaiannya termasuk yang tidak bisa dihindari atau sukarela.¹⁰ Perusahaan atau organisasi yang mampu menyajikan informasi secara cepat, akurat dan efisien akan memenangkan persaingan. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan tersebut adalah dengan menggunakan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian dan penentuan strategi atau langkah yang tepat yang perlu dilakukan untuk meningkatkan program kegiatan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan dengan intensitas sistem *e-planning* yang diterapkan di BAPPEDA Kota Medan dapat dilihat disemua bidang di Bappeda yang menggunakan sistem *e-planning*. Sedangkan pihak-pihak yang terkait dengan *E-*

⁹Taufik Teguh Pribadi Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi, di Medan tanggal 21 Februari 2020.

¹⁰Wulan Novianty Putri, Budhi Adhani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Sistem Ticketing Berbasis Oracle Dalam Rangka Meningkatkan Intensitas Penggunaan Sistem*, AKUN-t:Vol. 2 No 1 Oktober 2013/ISSN 23032146, h. 15.

Planning adalah perangkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, OPD, masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pihak terkait dengan user login tertentu memasukkan data musrembang dan Renja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Bappeda.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam hal ini intensitas dalam menggunakan sistem *e-planning* dapat memberikan keuntungan bagi OPD dalam mengusulkan program sehingga dapat mengubah suatu keadaan secara efektif sehingga dapat digunakan bagi para pegawai dengan lebih baik. Berdasarkan serta menunjukkan bahwa intensitas penggunaan sistem *e-planning* sangat sering digunakan karna dapat memberikan kemudahan bagi setiap OPD dalam menyusun program kerja dan lebih terjamin dalam aplikasi sistem *e-planning*.

b. Frekuensi

Salah satu hal yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan pemanfaatan suatu sistem informasi yaitu frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan. Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa frekuensi diartikan sebagai perputaran informasi. Aplikasi komputer berbasis web tersebut sangat membantu dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Kualitas program yang dihasilkan sudah terdokumentasikan baik itu program yang sudah disetujui maupun yang belum disetujui. Dilihat dari segi penerima maupun sebagai pengguna sistem *e-planning* diketahui bahwa usulan adalah sebagai bentuk permintaan sedangkan dari OPD hanya memilih program berdasarkan alokasi kegiatan yang ada serta layak untuk dilaksanakan. Sehingga kegiatan komunikasi dilakukan oleh Bappeda sebagai bentuk agar OPD menginginkan terjadinya kesinergian antara anggaran dan program yang di usulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini penulis melihat sistem ini mempunyai manfaat membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Medan dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil musrenbang, mampu membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan dalam menyusun dokumen perencanaan baik menengah ataupun tahunan sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah disusun, membantu dalam publikasi dokumen perencanaan ketingkat daerah, provinsi maupun pusat.

a. Jumlah

Jumlah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana disini yaitu pemanfaatan sistem *e-planning* diterapkan. Jumlah dimaksud disini yaitu seberapa banyak pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan untuk menggunakan sistem ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengguna sistem *e-planning* sebanyak 63 pengguna yang tersebar di seluruh bidang dengan rincian sekretariat 22 pengguna, bidang data 10 pengguna, bidang ekonomi 10 pengguna, bidang sosial budaya 11 pengguna, bidang fisik 10 pengguna. Artinya seluruh staf di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan telah menggunakan sistem aplikasi *e-planning* dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Pemanfaatan sistem *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Medan menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem *e-planning* sudah dimanfaatkan dengan baik dilihat dengan intensitas penggunaan, frekuensi serta jumlah user atau pengguna. Ditinjau dari intensitas menunjukkan bahwa para pegawai Bappeda Kota Medan sangat terbantu dengan adanya sistem *e-planning* ini, keefektifan para pegawai Bappeda dalam menginput data sehingga adanya pengurangan biaya. Ditinjau dari segi frekuensi menunjukkan bahwa mampu mensinkronisasi rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil musrenbang, mampu menghasilkan program usulan dengan baik, sehingga dapat mempercepat proses perencanaan dan penghematan anggaran. Membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan merumuskan

rencana kerja sesuai dengan usulan. Ditinjau dari segi jumlah pengguna sistem *e-planning* di Bappeda Kota Medan sangat banyak yaitu seluruh pegawai banyak dan dapat menerapkannya.

2. Hambatan Dalam Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

a. Belum meratanya sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan pembangunan

Kurangnya kemampuan tersebut ditambah dengan minimnya kemampuan dalam bidang perencanaan, hal ini tentunya akan sedikit banyak akan menghambat proses perencanaan pembangunan Kota Medan. Kekurangan sumber daya manusia sudah hal yang tak lazim lagi bagi instansi-instansi terkait, jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus maka akan sangat mengganggu proses pembangunan pada umumnya.

Ujung tombak keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah tersebut. Para pegawai harus mampu merumuskan rencana pembangunan diberbagai sektor, dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasarkan potensi daerah tersebut.

b. Inkonsistensi perencanaan pembangunan karena tekanan politisi

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kebijakan publik yang tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses kebijakan publik tersebut. Permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan pembangunan dan implementasinya. Hambatan tersebut tidak terlepas dari bagaimana proses kebijakan publik dirumuskan dengan keterlibatan banyak pihak sesuai dengan kapasitas dan kepentingannya masing-masing.

Pada pelaksanaanny suatu proses kebijakan publik dalam setiap tahapannya merupakan kegiatan yang kompleks didalamnya yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan masing-masing dan kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan tidak dirumuskan secara jelas dan tepat. Sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut sehingga kondisi yang demikian akan melahirkan konsekuensi terjadinya devias atas tujuan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

c. Seringnya perubahan yang terjadi

Pembangunan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang tidak pernah berhenti, demi mewujudkan perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan kualitas hidup masyarakat, dengan kualitas lingkungan kehidupan juga ikut terus mengalami perubahan.

Dengan mengikuti perkembangan maka pembangaunan tersebut akan baik untuk masa yang akan datang, namun jika sering perubahan yang terjadi apalagi proses pembangunan masih berjalan sedahap belum sepenuhnya terjadi maka ini akan ini akan mengkawatirkan untuk kedepannya. Setiap perencanaan pembangunan daerah harus mempunyai konsen pembangunan agar setiap perencanaan dapat terlaksana dengan baik.

3. Upaya Yang Dilakuan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sistem *E-Planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapahal terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik antara lain:

a. Melakukan Pelatihan

Pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi pengembangan terhadap karyawan melalui pendidikan dan pelatihan serta karier. Pendidikan dan pelatihan karyawan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan didalam perusahaan/organisasi atau di luar perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan.¹¹

Untuk meningkatkan kuaalitas pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sering melakukan pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini pelatihan mengaenai sistem dan tata cara penginputan data perencanaan ke dalam sistem. Mortensen mengemukakan bahwa teknologi informasi telah menjadi suatu komponen yang tidak dapat terpisahkan dari mekanisme kantor. Walaupun sangat banyak program yang tersedia, namun akan sulit jika digabungkan dengan personel yang tidak terlatih dan tidak mempunyai keahlian.¹² Pemahaman mengenai kemajuan teknologi juga sangat penting bagi para pegawai setiap instansi untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hasibuan mengemukakan (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu. Penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan/pegawai dan ditunjukan untuk pengembangan.¹³

b. Diberlakukannya *E-Planning*

Dengan diberlakukannya sistem *e-planning* diharapkan dapat menjadi alat dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang

¹¹Dr. Kasmir, S.E, M.M dan Jakfar, S.E, M.M, “*Studi Kelayakan Bisnis* “ (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 176.

¹²Jin Fung Tjhai , “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruh Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akutansi Publik*”, Jurnal Bisnis Dan Akutansi, Vol.5, No. 1, April 2003, h. 3.

¹³Sunarji Harahap, ”*Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah*” (FEBI UINSU Press: 2016), h. 319.

telah ditetapkan, aturan sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka secara sistematis dan aplikatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat mempercepat terwujudnya dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang berkualitas.

Suatu kinerja yang dihasilkan oleh faktor kesesuaian antara tugas dengan teknologi yang tersedia berimplikasi pada efisiensi, efektivitas dan kualitas yang lebih tinggi terhadap pemanfaatan teknologi serta implikasi kerja yang lebih baik pada sistem informasi. Kinerja yang mampu mencapai lebih baik tersebut karena kebutuhan individual dapat terpenuhi dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan tugasnya.

c. Mengikuti perubahan yang ada dengan cepat dan tepat

Fungsi terakhir komunikasi berhubungan dengan peranannya dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan cara menyampaikan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif yang ada.

Teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan, terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Iptek dapat membawa produk ilmu pengetahuan, terapan atau aplikasidari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia juga sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam

kehidupan dan lingkungannya yang berakibat kehancuran alam semesta jika kita atau seorang ilmuwan tidak menerapkannya secara fungsional.¹⁴

Maka dalam hal ini semua dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi serta mengikuti perubahan yang dilakukan karena adanya tuntutan situasi dan kondisi didalam lingkungan pekerjaan itu sendiri.

Dalam ekonomi islam diisyaratkan harus mempunyai rencana/*planning* dalam segala hal dengan yang baik, agar segala yang direncanakan akan menghasilkan laba yang akan diperoleh akan berlipat-lipat. Kita juga menyadari bahwa pembangunan tanpa penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif tidak mungkin terlaksana, maka dari itu dalam pembangunan harus memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Dengan demikian pembangunan akan dapat berjalan dengan seperti yang diharapkan serta semua lapisan masyarakat dapat menikmati pembangunan tersebut.

¹⁴Ahmad Fadlan, Ekonomi SDA & Lingkungan Hidup, Pusat Studi Pendidikan Rakyat: Medan, hlm. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan sudah dimanfaatkan dengan baik dilihat dengan intensitas penggunaan, frekuensi serta jumlah user atau pengguna. Dalam penerapan sistem *e-planning* dapat menghasilkan program perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, yang terintegrasi dalam sistem on-line dan on-line, terciptanya kemudahan bagi para pegawai pemerintahan dalam mensinkronisasi rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil musrenbang, mampu menghasilkan program usulan dengan baik sehingga dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan dan penghematan anggaran. Dan mampu membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan dalam menyusun dokumen perencanaan baik menengah ataupun tahunan sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah disusun, membantu dalam publikasi dokumen perencanaan ketingkat daerah, provinsi maupun pusat.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan sistem *e-planning* di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yaitu, sumber daya manusia belum merata dalam perencanaan pembangunan, inkonsistensi perencanaan pembangunan karena tekanan politisi dan seringnya perubahan yang terjadi.
3. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, diantaranya: melakukan pelatihan atau sejenisnya, yang kedua dengan di berlakukannya sistem *e-planning* ini, yang ketiga dengan cara mengikuti perubahan yang ada dengan cepat dan tepat.

B. Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran peneliti tujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan harus dapat memepertahankan budaya kebersamaan dan terus memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Medan. Dalam penerapan sistem *e-planning* para pegawai terus semangat dalam menyusun rencana program, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan tugas-tugas yang lainnya demi Kota Medan jauh lebih baik lagi.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan harus selalu semangat dalam menjalankan tugasnya, optimis dalam setiap perencanaan pembangunan yang yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
3. Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan terus memantau para pegawai dalam perkembangan penerapan sistem *e-planning*, sehingga jika dalam penerapan terdapat hambatan maka hambatan tersebut segera dicari solusinya yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

_____, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Fadlan Ahmad, *Ekonomi SDA & Lingkungan Hidup*, Medan: Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 2020

Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Harahap Isnaini, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, Medan: Perdana Publishing, 2018

Harahap Isnaini, et al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015

Jakfar dan Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2017

Kurtono Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Bandung : Alumni, 1986

Lewis Arthur, *Perencanaan Pembangunan, Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Noor Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011

Rahmani Bi Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Febi UINSU Press, 2016

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2009

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Suma di Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Sun'an Muammil & Senuk Abdurrahman, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015

Yafiz Muhammad, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi*, Medan: Febi UINSU Press, 2015

Jurnal

Budhi Adhani, Wulan Novianty Putri, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Sistem Ticketing Berbasis Oracle Dalam Rangka Meningkatkan Intensitas Penggunaan Sistem*, AKUN-t: Vol. 2 No 1 Oktober 2013/ISSN 23032146.

Grandis Teknotat Egis, *Efektifitas penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjar*

Harianto Balgi Fahmi Sani, *Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning*, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Vol 9 No1. Juni 2017

Harmonika Sri, *Hadist-Hadist tentang Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jurnal At-Tadair Vol 1, No 1, 2017

Jin Fung Tjhai, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Akutansi Publik*, Jurnal Bisnis Dan Akutansi, Vol.5, No. 1, April 2003

Juniawan Dedi Wayan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus Pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar)*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 5, No 3, 2019

Muhammad Rasuli, Ria Nelly Sari dan Virginia Ningsih, *Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pada Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*, Jurnal Ekonomi Vol 26, No 2, Juni 2018

Rubiyanto, *Implementasi Kebijakan E-Government Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No. 2018

Skripsi

Dhamayanti Sari Purnama Dian, *Analisis Penerapan SIMRAL di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2019

Websaite

<https://eplanning.pemkomedan.go.id>

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan-12>,

<https://www.slideshare.net/qiuel/pendekatan-perencanaan-pembangunan>

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertiansistem.html>

<https://www.bppkpd.com/layanan-aplikasi/E-Planning>

Wawancara

Adi Saputra Lubis, Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Medan, Wawancara Pribadi,
Medan, Tanggal 21 Februari 2020

Khalijah Siti, Kepala Sub Bagian Umum, Wawancara pribadi, Medan 24 Februari
2020.

Munawar Nabil, Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Meda, Wawancara pribadi,
Medan 21 Februari 2020.

Pribadi Teguh Taufik, Staf Sekertariat BAPPEDA Kota Meda, Wawancara
pribadi, Medan 21 Februari 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. NAMA | : Rahmadani |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Silo Bonto, 16 Maret 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Alamat | : Jl. Sentosa Lama No. 20, Medan |
| 6. No Hp | : 085271573310 |
| 7. Status | : Belum Menikah |
| 8. Email | : danirahma3310@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

1. SD 013863 Silo Bonto (2002-2009)
2. SMP Negeri 1 Silau Laut (2009-2012)
3. SMA Negeri 1 Air Joman (2012-2015)

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Air Joman (2014-2015)
2. Sekertaris Bidang Minat dan Bakat HMJ EKI (2018-2019)
3. Ketua Bidang Seni dan Olahraga DEMA FEBI UINSU (2019-2020)